



## Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENGAWASAN  
PENGUNAAN PARIT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016  
DI PARIT SATU KOTABARU SEBERIDA  
KECAMATAN KERITANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:****VISSA AFRILITA****11527202957**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1442 H/2020 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**


Skripsi ini berjudul "*Pengawasan Terhadap Penggunaan Parit Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Di Parit Satu Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang*".

Nama : VISSA AFRILITA  
 NIM : 11527202957  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juli 2020

Pembimbing Skripsi

  
MUSLIM S. Ag. S.H., M.Hum  
 NIP. 19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENGAWASAN PENGGUNAAN PARIT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 DI PARIT SATU KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG"** yang ditulis oleh :

Nama : VISSA AFRILITA  
NIM : 11527202957  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020  
Waktu : Jam, 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


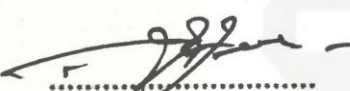

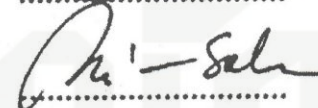
Pekanbaru, 11 Agustus 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. Drs. Hajar, M.Ag**

Sekretaris  
**Ilen rizal Hadi Wahab, LC. MA**


Penguji I  
**Dr. Muhammad Darwis, S.HI. MH**

Penguji II  
**Nur'aini Sahu, SH. MH**

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H pta milik IN Suska Riau

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## ABSTRAK

**Vissa Afrilita (2020) : Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pengawasan Penggunaan Parit berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Parit Satu Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang.**

Penelitian ini di latar belakang oleh pengamatan penulis tentang pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran terhadap Parit Satu Kotabaru Seberida. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan penggunaan Parit di Kotabaru Seberida menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 dan apa saja faktor penghambat dalam pengawasan Penggunaan Parit di Kotabaru Seberida.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di lapangan (*field research*). Menggunakan teknik observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Data primer dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat yang dijadikan sebagai responden. Sedangkan data sekundernya adalah data yang diperoleh dari beberapa buku dan karya ilmiah untuk menunjang penelitian. Dan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang berupa menghimpun data, dan setelah data terkumpul kemudian digambarkan secara deskriptif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pengawasan terhadap penggunaan Parit Satu Kotabaru Seberida serta faktor apa saja yang menghambat pengawasan terhadap penggunaan Parit tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pendorong masyarakat melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 terkait dengan pencemaran Parit Satu Kotabaru Seberida dikarenakan tidak ada pengawasan dan koordinasi dari Satuan Polisi Pamong Praja dengan Ketua RW sehingga masyarakat Parit Satu Kotabaru Seberida leluasa dalam melakukan tindakan pelanggaran dengan membuang dan menumpukkan sampah kedalam parit.





## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pengawasan Penggunaan Parit Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Parit Satu Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang”** dengan baik.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari terdapat banyak kesalahan. Jika terdapat kebenaran dalam penulisan skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun apabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini maka kesalahan itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari.

Dalam kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini, yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Kedua Orang tuaku yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan untukku, Ayahanda Jusmadi, S.Pdi. M.Pd. dan Ibunda Saidah. Terima kasih atas segalanya, maaf Ananda belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian.
2. Kepada Adik-adik dan Keluarga Besarku. Terimakasih atas Do'a dan dukungannya.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I, II dan III UIN SUSKA Riau.
4. Kepada Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, MC1 sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Maghfirah, M.A sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
5. Kepada Bapak Firdaus S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau. Terimakasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan.
6. Kepada Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum sekaligus pembimbing skripsi terimakasih karena telah memberikan bimbingan, memperbaiki, menyempurnakan materi, dan mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Bapak/Ibu dewan penguji ujian akhir, Bapak Henrizal Hadi Wahab LC. MA., Bapak Muhammad Darwis S.HI. M.H dan Ibu Nur'aini Sahu S.H. MH. Terimakasih telah membimbing dan menyempurnakan skripsi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada Bapak Peri Firmansyah S.H.,M.H dan Bapak Syafrinaldi S.H.,M.A. selaku Penasihat Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis.
9. Kepada Bapak/Ibu Dosen, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
10. Kepada Karyawan/Karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum terimakasih telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
11. Kepada Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN SUSKA Riau, terima kasih atas peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
12. Kepada semua sahabat dan teman-teman seperjuangan keluarga besar Jurusan Ilmu Hukum, Ilmu Hukum F dan Hukum Tata Negara B Angkatan 2015 Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terimakasih atas do'a dan dukungannya.
13. Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan yang telah memberikan bantuan dan nasehatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah SWT senantiasa menghimpun kita semua dalam kebaikan-Nya.

*Wassalaamu' alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, Juli 2020

Penulis,

**VISSA AFRILITA**  
**NIM. 11527202957**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b>	
A. Kotabaru Seberida .....	12
B. Pemerintahan Kotabaru Seberida .....	12
C. Kependudukan Kotabaru Seberida .....	14
D. Pendidikan .....	16
E. Agama .....	17
F. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja .....	18
G. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir .....	19
<b>BAB III LANDASAN TEORI</b>	
A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja .....	21
B. Teori tentang Pengawasan .....	25
C. Ketertiban Umum .....	30
D. Pencemaran Parit .....	30
E. Peraturan Daerah .....	35
F. Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat .....	41

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat ....	41
---	----

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Penggunaan Parit Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Di Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang .....	43
B. Faktor Penghambat Pengawasan Penggunaan Parit di Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang .....	54

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	59

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel. I.1	Populasi Dan Sampel .....	8
Tabel. II.1	Struktur Dan Kepengurusan Kotabaru .....	14
Tabel. II.2	Jumlah Penduduk Kotabaru Berdasarkan Jenis Kelamin.....	15
Tabel. II.3	Jumlah Penduduk Kotabaru Berdasarkan Suku .....	15
Tabel. II.4	Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk Kotabaru.....	15
Tabel. II.5	Jumlah Tingkat Pendidikan Penduduk Kotabaru .....	16
Tabel. II.6	Jumlah Sarana Ibadah di Kotabaru.....	17
Tabel. II.7	Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru.....	20



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan di daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.<sup>1</sup>

Dalam kerangka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengawasan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum. Tujuan utama pengawasan adalah memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketataan dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perizinan lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan hidup.

Dalam hubungannya dengan kualitas air, pengawasan memiliki nilai penting sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang tentang Sumber Daya Air Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Memastikan pengendalian pencemaran yang masuk ke sumber-sumber air dari pencemaran tertentu berjalan sesuai izin dengan mematuhi ketentuan yang di persyaratkan, dan
2. Memverifikasi akurasi informasi swapantau , pengujian dan pemantauan yang diberikan kegiatan dan/atau usaha dan laporannya.

Pengawasan terhadap kegiatan atau usaha dalam rangka pengendalian pencemaran tidak lepas dari upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan lingkungan. Namun diluar pengawasan terdapat beberapa perintah perundang-undangan yang juga merupakan alat untuk mencegah tercemarnya sumber air. Perintah perundang-undangan tersebut bersama-sama dengan pengawasan dan penegakan hukum sebagai instrumen dalam pengendalian pencemaran air. Jika perintah perundang-undangan tersebut dijalankan maka pengawasan dapat mereduksi tingkat pencemaran atas ketidaktaatan usaha atau kegiatan secara signifikan.<sup>2</sup>

Pesatnya pertumbuhan penduduk Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang selain membawa keuntungan dengan tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, industri dan sosial budaya, juga mengalami kemunduran pada suatu sisi. Hal ini diakibatkan oleh pembuangan sampah dan limbah rumah tangga dari masyarakat yang tinggal di sekitar Parit Satu Kotabaru yang menyebabkan pencemaran air pada parit tersebut.

Ketertiban dan ketentraman umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan

---

<sup>2</sup> Henri Subagio dkk, *Buku Pedoman Pengawasan dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air*, (Kebayoran Baru, Jakarta Selatan: ICEEL, 2017), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan umum.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Perundang-Undangan seperti Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat. yang mana Peraturan Daerah ini memuat pasal-pasal yang berisi ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Indragiri Hilir disertai dengan sanksi yang sah.

Berdasarkan ruang lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tersebut diantaranya meliputi<sup>3</sup> :

1. Tertib jalan;
2. Tertib jalur hijau, taman kota dan tempat umum;
3. Tertib sungai, parit, saluran air/drainase;
4. Tertib lingkungan;
5. Tertib usaha/berjualan;
6. Tertib bangunan;
7. Tertib pemilik dan penghuni bangunan;
8. Tertib sosial;
9. Tertib kesehatan;
10. Tertib bulan ramadhan; dan
11. Tertib suara.

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat .



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tujuan dari pembinaan, pengawasan, dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat ini adalah untuk melindungi masyarakat Indragiri Hilir, sarana dan prasarannya, beserta alamnya. Namun kenyataannya, dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut terutama dalam bidang tertib sungai, parit dan saluran airnya belum berjalan dengan baik. Kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah ke aliran sungai ataupun parit-parit menyebabkan pencemaran bahkan penyumbatan yang menyebabkan tidak berfungsinya aliran parit tersebut.

Berdasarkan ruang lingkup Peraturan Daerah diatas, maka aktivitas masyarakat yang membuang sampah ke parit tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini sudah barang tentu melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat Pasal 8 poin C yang berbunyi “setiap orang atau badan dilarang untuk melakukan perbuatan/aktivitas yang dapat menyebabkan tercemarnya air sungai, parit, dan danau”.

Jika di telaah secara bersama-sama, posisi pengawasan terhadap parit dan pengendalian pencemaran air parit merupakan bagian dari tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat yang menerangkan bahwa “pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama unsur terkait lainnya.”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagaimana telah diketahui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah dibidang peenyelenggaraan dibidang ketertiban umum danketentraman masyarakat. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 148 yang berbunyi sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Bunyi Pasal tersebut sangat jelas bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu Kepala Daerah sangat vital bahkan sangat menentukan keberhasilan program strategis Kepala Daerah. Karena ada dua kewajiban Kepala Daerah yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menegakkan seluruh perundang-undangan.

Namun pada kenyataannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan mencemarkan dan membuang sampah maupun limbah rumah tangga ke dalam parit tersebut.

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Bertolak dari fenomena yang terjadi diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang fenomena tersebut dengan judul penelitian “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Penggunaan Parit Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Di Parit Satu Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang”.

## **B. Batasan Masalah**

Dari berbagai identifikasi permasalahan tidak semua masalah akan penulis teliti. Mengingat keterbatasan waktu, dana, pikiran, dan tenaga. Supaya pembahasan skripsi ini terarah dan mencapai tujuan yang di inginkan serta tidak menyimpang dari pembahasan, maka penulis memberikan batasan masalah pada bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam mengawasi penggunaan parit di Parit Satu Kotabaru Seberida berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016.

## **C. Perumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru terhadap pelaksanaan pengawasan penggunaan Parit di Kotabaru Seberida menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pengawasan Penggunaan Parit di Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang ?



#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin penulis dapatkan dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru terhadap pengawasan penggunaan Parit berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Parit Satu Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pengawasan terhadap penggunaan Parit berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Parit Satu Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang.

Sedangkan manfaat dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kotabaru Seberida menyangkut Pengawasan Terhadap Penggunaan Parit Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Parit Satu Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang.
2. Menambah pengetahuan bagi penulis sehingga menjadi pengalaman yang bermanfaat dikemudian hari.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Sosiologis yang dilakukan di Parit Satu Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang. Alasan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis memilih tempat tersebut karena penulis menemukan kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaan di lapangan.<sup>5</sup>

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat Parit Satu Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang. Sedangkan objek dari Penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Parit Satu Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel<sup>6</sup> dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kotabaru Seberida, Ketua RW, Ketua RT dan masyarakat Parit Satu Kotabaru Seberida.

**Tabel. I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Desa	1	1	100%
2.	Sekretaris Desa	1	1	100%
3.	Ketua RW	1	1	100%
4.	Ketua RT	1	1	100%
3.	Satpol PP	7	5	14%
4.	Masyarakat	125	9	11%

Sumber : Olahan Data 11 Februari 2020.

## 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain :

<sup>5</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeta, 2014). h. 53.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 121.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*) atau tempat lokasi penelitian baik dengan metode pengamatan maupun wawancara dengan orang-orang yang ada kaitannya dengan permasalahan seperti Satuan Polisi Pamong Praja, masyarakat, dan Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan cara mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil karya ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

**5. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti dengan tujuan mencari tahu mengenai keadaan yang sebenarnya terkait pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan parit.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.
- c. Studi kepustakaan, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil karya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

- d. Dokumentasi, yang penulis maksudkan disini yaitu data tentang lokasi penelitian, subjek, objek penelitian, dan data-data baik yang berupa tertulis, tidak tertulis, maupun gambar.

## 6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Penulis menggunakan metode yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yakni pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan sehingga akan tampak kesenjangan antara peraturan pelaksanaan dengan fakta dilapangan.<sup>7</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penulisan.

---

<sup>7</sup>Suratman dan Philips Dillah, *opcit*, , hlm. 145.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, gambaran umum Parit Satu Kotabaru, baik secara geografis maupun demografis, dan informasi tentang Satpol PP Kotabaru Seberida.

## **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini memuat uraian teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi permasalahan meliputi pengawasan terhadap penggunaan Parit berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 11 Tahun 2016 di Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat uraian tentang pengawasan terhadap penggunaan Parit berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 11 Tahun 2016 di Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang dan untuk mengetahui penyebab terjadinya pencemaran air Parit Satu di Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat uraian tentang kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

#### A. Kotabaru Seberida

Kotabaru Seberida berdiri pada tahun 1940 yang mana sebelum berdiri Kotabaru Seberida merupakan bagian dari Kecamatan Seberida. Dengan berdirinya Desa Kotabaru Seberida ini sebagai Desa baru maka diberilah nama Desa ini yaitu Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau hingga sekarang.

Kotabaru Seberida adalah salah satu Desa di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Kotabaru Seberida terdiri dari 10 Rukun Warga (RW) dan 50 Rukun Tetangga (RT) yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan dengan luas wilayah  $\pm 37.200 \text{ M}^2$  dengan batas wilayah:

1. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Kotabaru Reteih
2. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Pasar Kembang
3. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kembang Mekar Sari
4. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Kayu Raja.

#### B. Pemerintahan Kotabaru Seberida

Berkat informasi dari orang-orang tua yang masih ada di Kotabaru Seberida maka dapat disusun urutan yang pernah menjadi Kepala Desa di Desa Kotabaru Seberida dari tahun 1940 masa sebelum kemerdekaan hingga sekarang ialah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Ibrahim 1940 sebelum kemerdekaan s/d 1947.
2. Abdul Rahman Sikin 1947 s/d 1952.
3. H. Ahmad Kahar 1952 s/d 1985.
4. H. M. Noer 1985 s/d 1990.
5. H. Idarwis Idris Tahun 1990 s/d 2006.
6. Termizi Yusuf Tahun 2006 s/d sekarang.

Kotabaru Seberida dengan tempat dan letaknya yang strategis dan ditunjang dengan transportasi darat yang ada dan semakin berkembangnya perekonomian ditunjang dengan pertumbuhan penduduk yang semakin padat sehingga Kotabaru Seberida dengan cepat menjadi pusat perekonomian Kecamatan Keritang dan merupakan Desa yang paling pesat berkembangnya. Dikarenakan faktor banyaknya kelurahan dan luasnya wilayah Kotabaru Seberida, maka pada tahun 2000 dibawah kepemimpinan bapak H. Idarwis Idris Kotabaru dimekarkan menjadi 3 desa yaitu:

1. Desa Kembang Mekar Sari
2. Desa Pasar Kembang
3. Desa Kotabaru Seberida.

Adapun struktur dan kepengurusan Desa Kotabaru Seberida adalah sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

**Tabel II.1**  
**Struktur dan Kepengurusan Kotabaru**

No	Nama	Jabatan	Periode	Keterangan
1.	Tarmizi Yusuf	Kepala Desa	2016 s/d sekarang	Aktif
2.	Darul Kutni	Sekretaris Desa	2004 s/d sekarang	Aktif
3.	Agus Salim	Seksi Pemerintahan	2004 s/d sekarang	Aktif
4.	Robi Candra	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan	2009 s/d sekarang	Aktif
5.	Yulisma	Kepala Urusan Keuangan	2011 s/d sekarang	Aktif
6.	Nanawati	Seksi Kemasyarakatan	2008 s/d sekarang	Aktif
7.	Siti Maimunah	Kepala Urusan Umum	2016 s/d sekarang	Aktif
8.	Ilyas	Kepala Urusan Perencanaan	2016 s/d sekarang	Aktif

*Sumber Data: Kantor Desa Kotabaru Seberida Tahun 2020.*

### C. Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus menjadi beban pembangunan. Jumlah penduduk Kotabaru Seberida adalah 9.106 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2.280 Kepala Keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Kotabaru Seberida. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.2**  
**Jumlah Penduduk Kotabaru Berdasarkan Jenis Kelamin**

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
2019	4.491 Jiwa	4.562 Jiwa	9.053 Jiwa
2020	4.519 Jiwa	4.587 Jiwa	9.106 Jiwa

Sumber Data: Kantor Desa Kotabaru Seberida Tahun 2020.

**Tabel. II.3**  
**Jumlah Penduduk Kotabaru Menurut Suku**

No.	Nama Suku	Jumlah Penduduk Laki-Laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Jiwa
1.	Banjar	633	545	1.178
2.	Batak	6	10	16
3.	Bugis	1.126	1.338	2.464
4.	Jawa	436	440	876
5.	Melayu	2.039	1.979	4.018
6.	Minang	267	262	529
7.	Tionghoa	12	13	25

Sumber Data: Kantor Desa Kotabaru Seberida Tahun 2020

**Tabel II.4**  
**Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk Kotabaru**

No.	Dusun dan Jumlah Rukun Tetangga (RT)	Jumlah Penduduk Tahun 2019	Jumlah Penduduk Tahun 2020
1.	Dusun Teladan RT 1-3	699	706
2.	Dusun Pelita RT 1-4	1.434	1.439
3.	Dusun Duku RT 1-4	973	981
4.	Dusun Damai RT 1-4	385	391
5.	Dusun Mekar RT 1-5	983	992
6.	Dusun Sepakat RT 1-5	1.045	1.049
7.	Dusun Keramat RT 1-5	317	270
8.	Dusun Mulia RT 1-6	639	642
9.	Dusun Taqwa RT 1-6	1.304	1.311
10.	Dusun Belimbing RT 1-6	1.268	1.272
<b>Total</b>		<b>9.047</b>	<b>9.053</b>

Sumber Data: Kantor Desa Kotabaru Seberida Tahun 2020.

## D. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan yang baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru guna untuk mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

**Tabel II.5**  
**Jumlah Tingkat Pendidikan Penduduk Kotabaru**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Tamat SD	17,19%
2.	Tamat SMP	12,07%
3.	Tamat SMA	8,99%
4.	Tamat Perguruan Tinggi	5,21%
5.	Pelajar SD	13,24%
6.	Pelajar SMP	9,02%
7.	Pelajar SMA	3%
8.	Mahasiswa	2,24%
9.	Tidak Sekolah dan Putus Sekolah	15%
10.	Belum Sekolah	14,04%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

*Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kotabaru Seberida, 2020*

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di Kotabaru Seberida jumlah dan presentase penduduk berdasarkan tingkat pendidikan ialah Tamat SD 17.19% atau 1.566 orang, Tamat SMP 12,07% atau 1.096 orang. Tamat SMA 8.99% atau 819 orang, Tamat Perguruan Tinggi 5.21% atau 476 orang dan Pelajar SD 13,24% atau 1.113 orang, Pelajar Sekolah Menengah Atas 3%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau 549 orang, Mahasiswa Perguruan Tinggi 2,24% atau 204 orang, Tidak Sekolah dan Putus Sekolah 15% atau 1.361 orang, Belum Sekolah 14,04% atau 1.196 orang. Dari data terlihat bahwa kebanyakan penduduk Kotabaru Seberida ialah yang Tidak Sekolah dan Putus Sekolah yaitu sebesar 15% atau 1.361 orang.

## E. Agama

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari kantor Desa Kotabaru Seberida, bahwa hampir seluruh masyarakat Desa Kotabaru Seberida beragama Islam, karena hampir semua penduduknya adalah asli yaitu Suku Melayu. Meskipun ada penduduk pendatang, Tapi jumlahnya masih sangat sedikit bahkan hampir tidak terlihat. Dalam memperoleh ilmu agama mereka belajar kepada ulama-ulama setempat yang dianggap mampu mengajarkan ilmu agama. Sarana peribadahan di Kotabaru Seberida telah memadai, mereka juga sering sholat berjamaah di Masjid atau di Mushalla, di samping untuk tempat Ibadah mereka juga mengadakan wirid yasin setiap hari jum`at dan wirid yasin ini di adakan secara bergiliran dari rumah-kerumah.

**Tabel II.6**  
**Jumlah Sarana Ibadah di Kotabaru**

No	Nama tempat ibadah	Jumlah
1.	Masjid	4 unit
2.	Musallah	6 unit
<b>Total</b>		<b>10 unit</b>

*Sumber Data : Kantor Desa Kotabaru Seberida, 2020.*

## F. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di daerah provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto *Praja Wibawa* yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja, pada masa setelah prklamasi kemerdekaan di mana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pada masa itu dibentuklah Datasemen Polisi sebagai penjaga keamanan kepanewon di Yogyakarta. Sesuai denga surat perintah jawatan praja di DKI Yogyakarta yang bertujuan unntuk menjaga ketentraman dan ketertian masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Datasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada tahun 1960, dimulailah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar daerah Jawa dan Madura melalui dukungan para petinggi Militer.

Pada tahun 1962, namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara. Pada 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan semakin disempurnakan dengan peraturan-peraturan yang baru yang pada tujuannya mengarah kepada perbaikan. Hingga selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 90 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

#### **G. Visi, Misi dan Struktur Kepengurusan Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir**

1. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah “Terwujudnya situasi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif di Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai pusat kegiatan ekonomi regional yang berbasis pertanian dan sumber daya perairan, didukung oleh sumber daya manusia yang mandiri, agamis, sejahtera lahir dan bathin”.
2. Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah:
  - a. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat.
3. Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

**Tabel II.7**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru**

No.	Nama	Jabatan	Periode
1	Dasril S.Hum	Kepala Satpol PP	2009-Sekarang
2	Apriadi	Anggota Satpol PP	2012-Sekarang
7	Eprizal	Anggota Satpol PP	2014-Sekarang
4	Jamil Kairi	Anggota Satpol PP	2010-Sekarang
5	Muhajir	Anggota Satpol PP	2011-Sekarang
6	Muhtar	Anggota Satpol PP	2013-Sekarang
3	Syaifullah	Anggota Satpol PP	2012-Sekarang

*Sumber Data : Kantor Satpol PP Kotabaru Seberida, 2020.*

## BAB III

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja

Kata peran mempunyai arti laku, hal berlaku atau bertindak, pelaku, pemain. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang itu telah menjalankan suatu peran.

Dalam organisasi setiap individu memegang peran dan wewenangnya masing-masing dimana untuk dapat mencapai suatu tujuan organisasi tiap-tiap individu tersebut dituntut untuk menjalankan perannya secara maksimal. Peran dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

##### 1. Peran Aktif

Adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifis kelompok. Seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya;

##### 2. Peran Partisipatif

Adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang emberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri;

##### 3. Peran Pasif

Adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Apriaji Setiawan, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda*, *Ejournal Administrasi Negara*, Vol. 5 No. 3. (2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Secara eksplisit peranan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dalam Peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjabarkan bahwa pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada Pasal 4 yang menjabarkan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yakni menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan pada Pasal 5 dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

1. Menyusun program dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Mengawasi masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.<sup>9</sup>

Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana yang dimaksud adalah :

1. Mengikuti proses penyusunan praturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
2. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
3. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
5. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah/kegiatan yang berskala besar;
6. Melaksanakan tugas pemerintahan umum yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Dalam menjalankan tugas menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja harus mampu menghadapi berbagai kondisi dan tantangan global. Tetapi yang lebih penting, tentu saja Satuan Polisi Pamong Praja harus mencoba menempatkan fungsi pemandu pada publik dibandingkan dengan penegakan hukum. Ini penting sebagai upaya untuk mencegah orang agar

<sup>9</sup> Gunawan, *Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Aceh*, *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*. Vol 4 No. 2. (2012).

<sup>10</sup> Muhammad Rodhiyallah, Amiartuti Kusmaningtyas, Hendro Tjahjono, *Analisis Pengaruh Kepemimpinan Dan Komunikasi Terhadap Motivasi Dan Kinerja Pegawai (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)*. *Journal Business And Finance* Vol 2, No. 1. (2017)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi sadar hukum dan memahami pentingnya perdamaian dan ketertiban umum. Mengingat bahwa ada kecenderungan ketika penegakan hukum lebih ditekankan ada potensi konflik.

Tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja semakin penting dalam administrasi pemerintahan, memiliki tugas langsung menangani administrasi ketertiban umum dan perdamaian di daerah masing-masing. Dalam konteks menegakkan Peraturan Daerah peran Satuan Polisi Pamong Praja disamping hak untuk melakukan pemeriksaan juga dapat bersifat refresif yang tidak bersifat hukum terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.

Peran penting lainnya dalam merancang strategi untuk menerapkan perdamaian dan ketertiban umum adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan. Ini sangat penting karena dengan dukungan SDM yang handal peluang untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum dapat terwujud. Terlepas dari apakah citra Satuan Polisi Pamong Praja benar atau tidak dimata masyarakat. Tugas dan fungsinya dalam konteks membina keamanan dan penegakan hukum.<sup>11</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis sebagai tindakan terkait dengan fungsi dan wewenang yang mereka miliki. Yaitu:

---

<sup>11</sup> Putu Gede Indra Paramartha, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani, *Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat* *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 2. 2020.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Menjunjung Peraturan Daerah yang erat kaitannya dengan keberadaan pemerintah daerah karena keberadaannya didukung oleh berbagai Peraturan Daerah yang ada;
2. Mengatur ketertiban umum dan kedamaian publik yang terkait dengan salah satu tugas utama pemerintah daerah.

Sebagai aparatur negara Satuan Polisi Pamong Praja seyogyanya mampu melakukan fungsi pemeliharaan dan menjaga ketertiban serta keamanan selain menjalankan tugasnya untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penegakan terhadap berlakunya Peraturan Daerah serta keberadaannya dituntut adanya penegakan kebijakan pemerintah daerah lainnya. Tanpa kondisi yang baik, ketertiban umum dan kedamaian masyarakat akan mengganggu jalannya pemerintahan di daerah tersebut.<sup>12</sup>

### B. Teori Tentang Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan agar efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja telah di jalankan. Pengawasan juga dapat mendeteksi

---

<sup>12</sup> Putu Gede Indra Paramartha, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani, *ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejauh mana kebijakan pemimpin di jalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Menurut Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan daripada seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>13</sup>

Sedangkan Ir. Sujamto mengemukakan pengertian pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>14</sup>

Dalam pengawasan diperlukan standar atau tolok ukur pengawasan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan untuk memberikan petunjuk kepada lembaga aparat pengawas agar bertindak menurut peraturan yang berlaku.

### 1. Macam-macam Pengawasan

#### a. Pengawasan Prefentif dan Pengawasan Refresif

Secara umum pengertian pengawasan prefentif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan. Ini berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana.

Pengawasan prefentif mengandung prinsip bahwa Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku setelah ada pengesahan pejabat yang berwenang.

<sup>13</sup> S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1970. hlm. 107.

<sup>14</sup> Ir. Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1986. hlm. 19.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Pengawasan Refresif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Pengawasan refresif ini merupakan kebalikan dari pengawasan prefentif.

Pengawasan refresif dikenal sebagai salah satu bentuk/cara dalam pengawasan atas berjalannya pemerintahan daerah otonom. Pengawasan refresif dilakukan terhadap semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pengawasan refresif berwujud penangguhan atas pembatalan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Penangguhan atau pembatalan itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

#### b. Pengawasan Umum

Merupakan suatu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintahan Daerah dengan baik. Pengawasan umum terhadap pemerintahan Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Bupati sebagai wakil Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

#### c. Pengawasan Ekstern dan Pengawasan Intern

Secara Harfiah berarti pengawasan dari luar. Dalam pengawasan ekstern subjek pengawasan yaitu pengawas berada di luar susunan oerorganisasi objek yang diawasi. Sedangkan pengawasan Intern merupakan kebalikan dari pengawasan ekstern

d. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap objek yang diawasi. Sedangkan Pengawasan Tidak Langsung adalah merupakan kebalikan dari Pengawasan Langsung jadi pengawasan tidak langsung itu dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi, atau tegasnya pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Sesuai dengan sifatnya, pengawasan tidak langsung merupakan cara pengawasan yang banyak mengandung kelemahan, dikarenakan segala informasi belum tentu sesuai dengan kenyataan di lapangan.

**2. Norma Umum Pengawasan**

- a. Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan mencari siapa yang salah tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan, dan hambatan supaya dilaporkan sebab-sebab dan bagaimana terjadinya, serta mencari jalan bagaimana memperbaikinya.
- b. Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan terus-menerus sehingga memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan.
- c. Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan untuk mencegah berlanjutnya kesalahan dan penyimpangan tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan kesan untuk memperbaiki, mengurangi, atau bahkan meniadakan penyimpangan disamping menjadi pendorong untuk menciptakan kesempurnaan kondisi objek pengawasan.<sup>15</sup>

### **3. Subjek Pengawasan**

Subjek pengawasan biasanya terdiri dari pejabat/petugas/team yang ditugaskan atas surat perintah dari pejabat yang berwenang, misalnya Menteri, Gubernur, Bupati, atau pejabat-pejabat lain yang bertindak atas nama mereka. Subjek pengawasan ini adalah pihak-pihak yang mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap objek yang diawasi. Dengan kata lain, subjek itu merupakan kata tunuk yang menunjukkan kata “siapa”.

### **4. Objek Pengawasan**

Objek pengawasan bukanlah orang, melainkan sesuatu. Objek pengawasan merujuk pada kata “apa”.

### **5. Sasaran Pengawasan**

Sasaran pengawasan biasanya menunjukkan kepada apa yang hendak dicapai oleh pengawasan. Biasanya di terjemahkan sebagai target yang diawasi dapat juga berarti tujuan pokok atau tujuan akhir pengawasan.

---

<sup>15</sup> Ir. Sujamto, *Ibid*, hlm. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 6. Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pengawasan adalah untuk mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Disisi lain Marbun mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan-penyimpangan dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi.

## C. Ketertiban Umum

Istilah ketertiban umum menurut Kollewijn memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum hukum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam ketertiban, kesejahteraan, keamanan (*Rust en Veiligheid*). Ketiga, sebagai pasangan dari kesusilaan yang baik (*Goede Zeden*). Keempat, sebagai sinonim dari ketertiban hukum (*Rechtorde*). Ataupun kelima, sebagai keadilan. Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil. Dan terakhir, sebagai kewajiban hakim untuk memperoleh pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.<sup>16</sup>

## D. Pencemaran Parit

Sumber daya air dinilai sangat penting bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai mana diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ *Bumi dan air dan kekayaan*

<sup>16</sup> Yu Un Opposunggu, *Pertemuan Ilmu Hukum Dan Sosiologi Dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum "Law Society & Develovment"*, Vol 2, No 3 2008.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negaradan di pergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan rakyat”.<sup>17</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 14 menerangkan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah “Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.<sup>18</sup>

Pencemaran lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan manusia, karena itu selama dua abad terakhir ini telah terjadi momentum peningkatan kerusakan lingkungan hidup secara keseluruhan di permukaan bumi ini sebagai hasil dari kegiatan manusia. Hal ini diperparah lagi oleh kondisi jumlah populasi manusia dari masa ke masa selalu bertambah dengan pesat. Sedangkan hasil teknologi kegiatan limbah tidak menentu sehingga terjadi korelasi positif antara kecepatan peningkatan populasi manusia dengan kenaikan kuantitas limbah di bumi ini.<sup>19</sup>

Komponen pencemaran air yang berasal dari industri rumah tangga (pemukiman) dan pertanian menurut Wisnu Wardhana adalah :

1. Limbah padat;
2. Bahan buangan organik dan olahan bahan makanan;
3. Bahan buangan anorganik;

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>18</sup> Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009.

<sup>19</sup> Krida K Septian, *Efektifitas Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Tangerang Selatan*. hlm. 63.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bahan buangan berupa panas (polusi *thermal*);
5. Bahan buangan zat kimia, yaitu sabun, insektisida, dan zat pewarna.<sup>20</sup>

Pemahaman akan pencemaran sangat penting artinya baik bagi masyarakat maupun bagi pengusaha. Seringkali pencemaran itu diinterpretasikan secara sempit sehingga jangkauan pemahamannya terbatas pada hal-hal yang sifatnya insidentil belaka padahal adanya pencemaran dan dampak yang di timbulkan olehnya baru dapat di deteksi setelah puluhan tahun berlangsung. Pengamatan terhadap berbagai industri menunjukkan bahwa pencegahan dan pengendalian pencemaran bukanlah pekerjaan yang mudah.

Saat ini pemanfaatan sungai dilakukan secara berlebihan tanpa memikirkan dampak dan akibatnya. Banyak sungai yang rusak dan tercemar akibat limbah oleh rumah tangga maupun oleh perusahaan atau industri yang ada disekitar sungai. Rusaknya ekosistem sungai berdampak negatif khususnya bagi masyarakat yang tinggal disekitar sungai. Ekosistem sungai yang rusak menyebabkan menurunnya jumlah debit air secara fluktuatif pada musim hujan dan kemarau, penurunan cadangan air serta penurunan jasa lingkungan. Hal ini tentu dikhawatirkan akan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan habitat sungai bila tidak dilakukan perbaikan serta tindakan perlindungan semacam konservasi sungai dan sebagainya.

<sup>20</sup> Wisnu Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi. 2001. hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Upaya Pengendalian Pencemaran Air

Pengendalian pencemaran adalah upaya untuk memaksimumkan dampak positif dan meminimumkan dampak negatif. Optimalisasi semacam ini sangat dipengaruhi oleh faktor politis, sosial, dan budaya.<sup>21</sup>

Pengendalian pencemaran dapat dilakukan dengan upaya:

- a. Pemantauan kualitas air;
- b. Penetapan daya tampung beban pencemaran air;
- c. Penetapan baku mutu air limbah;
- d. Pembuatan IPAL;
- e. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air.

## 2. Upaya Mengatasi Pencemaran Air

Upaya untuk mengatasi pencemaran air dapat dilakukan dengan cara:

- a. Preventif

Dimana pemerintah telah memberlakukan Undang-undang no. 32 Tahun 2019 tentang Pengendalian Pencemaran Kualitas Lingkungan Hidup. Dimana kita mempunyai andil yang cukup besar untuk menentukan kualitas hidup daerah masing-masing. Kuratif, dimana pemerintah setempat harus mewajibkan adanya gotong royong dalam membersihkan sungai secara rutin. Karena sungai telah tercemar. Langkah terbaik adalah membersihkan atau mensterilisasikan sungai tersebut.

---

<sup>21</sup> Diana Hendrawan, *Kualitas Air Sungai Dan Situ DKI Jakarta*, Makara Teknologi Vol 9 No.1 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Rehabilitatif

Usaha lanjutan dari kuratif dimana setelah kita membersihkan sungai maka tugas kita untuk menjaganya secara berkala dan berkesinambungan. Dan menindak lanjuti para pencemar sungai.

c. Promosi

Hendaknya media massa bekerja sama dengan pemerintah dan warga setempat dalam mengajak masyarakat menjaga sungai, apa dampaknya, bisa dalam iklan ataupun sosialisasi lembaga-lembaga pemerintahan.

d. Memperhatikan Sikap dan perilaku masyarakat

Masyarakat disekitar sungai perlu merubah perilaku tentang pemanfaatan sungai agar sungai tidak lagi di pergunakan sebagai tempat pembuangan sampah dan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK). Peraturan pembuangan sampah industri hendaknya dipantau pelaksanaannya dan pelanggarnya dijatuhi hukuman. Limbah industri hendaknya di proses dahulu dengan teknik pengolahan limbah dan setelah memenuhi syarat baku mutu air buangan baru bisa dialirkan ke selokan-selokan atau sungai. Dengan demikian akan tercipta sungai yang bersih dan memiliki fungsi ekologis.

Banyak tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai cara penanggulangan pencemaran air, yaitu:

- 1) Tidak membuang sampah atau limbah cair kesungai, danau, dan laut;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tidak menggunakan sungai atau danau untuk tempat mencuci truk, mobil, dan sepeda motor;
- 3) Tidak menggunakan sungai atau danau untuk wahana memandikan ternak dan sebagai tempat kakus;
- 4) Tidak minum air dari sungai, danau atau sumur tanpa dimasak dahulu.
- e. Pemerintah berperan dalam upaya pengendalian pencemaran air, yaitu dengan cara menerapkan:
  - 1) Perizinan pembuangan air limbah kesumber air;
  - 2) Penyediaan informasi;
  - 3) Penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air;
  - 4) Pembinaan dan pengawasan;
  - 5) Koordinasi antar instansi yang berkepentingan dalam pengendalian pencemaran air;
  - 6) Penerapan konsep partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran air.<sup>22</sup>

#### E. Peraturan Daerah

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 pada Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

<sup>22</sup> Yesi Gusriani, *Strategi Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak Kabupaten Siak*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagir Manan berpendapat bahwa Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.<sup>23</sup>

Maria Farida membagi Peraturan Daerah menjadi dua, yaitu:

**1. Peraturan Daerah Tingkat I**

Peraturan Daerah Tingkat I adalah peraturan yang dibentuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I bersama sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) atau dengan kata lain peraturan Kepala Daerah Tingkat I (Peraturan Gubernur) adalah Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi tersebut. Namun, pembentukan Peraturan Daerah Tingkat I (Peraturan Gubernur) ini dapat juga merupakan limpahan wewenang (delegasi) dari suatu Keputusan Presiden.<sup>24</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Kewenangan Peraturan Daerah Tingkat I ini merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya sendiri

<sup>23</sup> Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995. hlm. 8.

<sup>24</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op.Cit.* hlm. 102.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- a. Pemerintahan Daerah Provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri;
- b. Pemerintahan Daerah Provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan cara menugasi Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan
- c. Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan cara menugasi Desa.

Sedangkan kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi diterangkan pada Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi berwenang mengatur urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi berwenang mengatur urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pemerintah Daerah Provinsi berwenang mengatur urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pemerintahan Daerah Provinsi berwenang mengatur urusan Pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Peraturan Daerah Tingkat II

Peraturan Daerah Tingkat II adalah Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II dalam melaksanakan Otonomi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota).<sup>25</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Tingkat II ini merupakan pemberian wewenang (atribusian) untuk mengatur daerahnya sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- a. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- c. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

---

<sup>25</sup> Maria Farida, *Ibid.*, hlm. 103.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- d. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pemerintah pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi diterangkan pada Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang mengatur urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang mengatur urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang mengatur urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang mengatur urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

### **3. Asas Pembentukan Peraturan Daerah**

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuknya yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

**4. Materi Muatan Dalam Peraturan Daerah**

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menerangkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, keselarasan.

Selain harus mencerminkan asas diatas, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi muatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan serta menampung kondisi Khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

**F. Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat**

**Bagian Ketiga**

**Tertib Sungai, Parit, Saluran Air/Drainase**

**Pasal 8**

Setiap orang atau badan dilarang untuk:

4. Melakukan perbuatan/aktivitas yang dapat menyebabkan tercemarnya air sungai, parit, dan danau.

**G. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.**

**Bab II**

**Maksud Dan Tujuan**

**Pasal 2**

1. Maksud peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan bertindak bagi pelaksana Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.

2. Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan dan penciptaan kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan di Parit Satu Kotabaru Seberida, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya pencemaran dan pendangkalan yang terjadi pada Parit Satu Kotabaru Seberida disebabkan oleh:

1. Kurangnya kesadaran warga Parit Satu Kotabaru Seberida dalam menjaga kebersihan lingkungan terutama kebersihan parit tersebut. Diantara aktivitas masyarakat yang menimbulkan pencemaran parit tersebut adalah perbuatan masyarakat yang kerap kali membuang dan menumpuk sampah ke badan parit.
2. Tidak ada interaksi dan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Ketua RT maupun Ketua RW Parit Satu Kotabaru Seberida, sehingga masyarakat menganggap Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemuka setempat tidak mempermasalahkan perbuatan mereka yang mencemarkan parit tersebut.
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru Seberida tidak menyusun program kerja untuk pelaksanaan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah.
4. Tidak dilakukannya sosialisasi ataupun himbauan terhadap masyarakat secara berkala guna merubah paradigma dan sikap warga terhadap penggunaan parit tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Tidak ada larangan, pengawasan dan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah setempat khususnya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai badan yang membantu Kepala Daerah dengan menegakkan peraturan daerah dan diberi tanggung jawab sebagai pengawas dan penyelenggara ketertiban umum dan penyakit masyarakat seperti yang telah tercantum dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016.
6. Dana operasional dan sarana-prasarana yang kurang memadai untuk dilakukannya operasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 11 tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit masih jauh dari kata optimal terutama pengawasan kebersihan dan ketertiban paritnya.

#### B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat Kotabaru Seberida agar lebih memperhatikan kebersihan lingkungannya dan menghilangkan kebiasaan buruk seperti membuang sampah kedalam badan parit.
2. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru Seberida agar lebih memperhatikan keadaan lingkungan masyarakat dan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh .

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, 2011. Perihal Undang-Undang. Jakarta, Rajawali Pers.
- Assikin Zainal, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Dillah Philips, Suratman, 2014. Metode Penelitian Hukum. Bandung, Alfabeta.
- Gunawan, 2012. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Aceh.
- Gusriani Yesi, 2014. Strategi Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak Dikabupaten Siak.
- Hendrawan Diana, 2005. Kualitas Air Sungai Dan Situ DKI Jakarta.
- Indra Paramartha Putu Gede, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani, 2020. Fungsi Satuan Polisi Pamogng Praja Provinsi Bali Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat.
- Indrati Soeprapto Maria Farida, 1998. Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya. Deresan, Yogyakarta: Kanisius.
- Manan Bagir, 1995. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, Bandung: LPPM Universitas Bandung.
- Noor, Juliansyah, 2011. Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah. Jakarta Kencana Media Group.
- Opposunggu Yu Un, 2008. Pertemuan Ilmu Hukum Dan Sosiologi Dalam Penerapan Lemabaga Ketertiban Umum "Law Society & Develovment".
- Rodhiyallah Muhammad, Amiartuti Kusmaningtyas, Hendro Tjahjono, 2017. Analisis Pengaruh Kepemimpinan Dan Komunikasi Terhadap Motivasi Dan Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
- Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Septian Krida K, 2012. Efektifitas Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Tangerang Selatan.
- Setiawan Apriaji, 2017. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siagian, S.P,1970. Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta.

Soimin, 2010. Pembentukan peraturan perundang-undangan negara di indonesia, yogyakarta UII Press.

Subagio Henri, dkk, 2017. Buku Pedoman Pengawasan dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air. Jakarta Selatan ICEEL.

Sujamto, I.r, 1986. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

Sunggono Bambang, 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Wardhana Wisnu, 2001. Dampak Pencemaran Lingkungan Edisi Revisi. Yogyakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang tentang Sumber Daya Air Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.



## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM  
DAN PENYAKIT MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Indragiri Hilir yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana beserta kelengkapannya;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan, pengawasan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat, maka diperlukan pengaturan tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754 );
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran negara tahun 2002 Nomor 109, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
13. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5094);



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hilir.

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi;
6. Korporasi adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Kabupaten Indragiri Hilir yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang memuat ketentuan pidana.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.
10. Ketertiban Umum adalah suatu tatanan atau keadaan yang teratur sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
11. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat.
12. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan dan menurut rencana tata ruang wilayah ditetapkan sebagai daerah yang diatasnya tidak didirikan bangunan.
13. Taman adalah jalur hijau atau lokasi tertentu yang dipergunakan dan dikelola untuk pertanaman yang berfungsi untuk memperindah tempat tertentu.
14. Kendaraan adalah kendaraan yang dipergunakan untuk angkutan orang / barang di jalan umum.
15. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
16. Trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut yang diperuntukan bagi orang berjalan kaki.
17. Parit adalah aliran air yang dibuat oleh manusia yang fungsinya seperti fungsi sungai;
18. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat.
19. Penyakit Masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tatakrma kesopanan sedangkan akibat hukumnya bagi si pelaku ada yang belum terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pengamen adalah orang yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang melakukan apresiasi seni dengan menampilkan karya seni, yang dapat didengar orang lain dengan mengharap imbalan atau upah sebagai balas jasa.
21. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
22. Pornoaksi adalah kegiatan mengeksploitasi material dan informasi erotis mengenai seks dan hiburan.
  23. Penjaja Seks Komersial adalah wanita yang memenuhi kebutuhan hidupnya baik memperoleh imbalan maupun tidak, yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama, kesopanan yang berlaku di masyarakat.
  24. Laki-laki hidung belang adalah laki-laki yang membayar atau dibayar atas layanan lahir atau batin oleh wanita tuna susila atau oleh pasangan di luar nikah baik secara langsung maupun tidak langsung.
  25. Waria adalah seseorang yang memiliki kelamin pria atau kelamin ganda yang mempunyai jiwa / tingkah laku seperti wanita.
  26. Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama, dan norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
  27. Pembinaan adalah perbuatan membina yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
  28. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
  29. Pengendalian adalah usaha untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang atau badan untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan.
  30. Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan dan penginapan berikut makan dan minum.
  31. Wisma adalah fasilitas berbentuk rumah yang terdiri dari kamar-kamar untuk disewakan sebagai tempat bermalam.
  32. Pemondokan atau rumah kost yang selanjutnya disebut pemondokan adalah rumah terdiri dari kamar-kamar untuk disewakan sebagai tempat tinggal dengan sewa per bulan atau per tahun.
  33. Penghuni adalah penghuni bangunan atau perkarangan baik pemilik maupun bukan pemilik.
  34. Objek wisata adalah fasilitas umum untuk berekreasi, baik yang alami maupun buatan.
  35. Tempat hiburan adalah fasilitas umum dimana orang bisa menikmati hiburan seperti film, musik dan karaoke atau menikmati minuman atau tempat bersenang-senang.
  36. Cafe adalah tempat pelayanan mendapatkan minuman yang pengunjungnya mendapatkan sajian hiburan berupa musik atau dalam bentuk lainnya.
  37. Salon kecantikan adalah tempat usaha melayani jasa kecantikan dan pemotongan rambut.
  38. Prostitusi adalah praktek pelacuran atau perbuatan persetubuhan atau hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan tanpa melalui akad pernikahan yang sah.
  39. Homoseks adalah hubungan seks dengan pasangan sejenis pria dengan pria.
  40. Lesbian adalah wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya.
  41. Biseksual adalah individu yang dapat menikmati hubungan seksual dengan orang dari kedua jenis kelamin.
  42. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama kesopanan, antara lain pelacuran, laki-laki hidung belang, waria, meminum minuman keras, serta perbuatan maksiat lainnya yang belum terjangkau oleh hukum yang berlaku.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

43. Tempat maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi kearah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri.
44. Perantara adalah orang yang menghubungkan secara langsung maupun tidak langsung antara pasangan berlawanan jenis kearah terlaksananya perbuatan maksiat baik mendapat imbalan atau usahanya tersebut.
45. Backing adalah orang atau kelompok yang melindungi atau memberikan jasanya baik secara fisik maupun non fisik sehingga terjadi perbuatan.
46. Penyimpangan seksual lainnya adalah penyaluran seksual yang dilakukan oleh perseorangan atau lebih diluar kewajaran selain homoseks dan lesbian.
47. Penyalahgunaan Lem adalah perbuatan dimana seseorang menghirup uap lem dengan maksud membuat sensasi atau mabuk.
48. Oplos adalah mencampur obat dan sebagainya sehingga dengan mengkonsumsinya menjadi mabuk atau hilang kesadaran.
49. Daerah milik jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai Pemerintah Daerah dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertentu.
50. Turap adalah dinding vertikal yang relatif tipis yang berfungsi menahan tanah ataupun menahan masuknya air kedalam lubang galian.
51. Hawa nafsu adalah sebuah perasaan atau emosional yang besar dalam diri manusia berkaitan langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang.
52. Pengeras suara adalah perlengkapan yang terdiri dari micropon, aplifier, loud speaker, dan kabel-kabel tempat mengalirnya arus listrik.

#### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum yang benar menyelaraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman dan tentram.
- (2) Tujuan dari peraturan daerah ini untuk menjaga agar tetap terpelihara tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

#### BAB III RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup bidang ketertiban umum dan penyakit masyarakat yang merupakan kebutuhan warga masyarakat dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah.

#### BAB IV KETERTIBAN UMUM

##### Pasal 4

Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini Meliputi:

- a. tertib jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman kota dan tempat umum;
- c. tertib sungai, parit, saluran air/drainase;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib usaha/berjualan;

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. tertib bangunan;
- g. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- h. tertib sosial;
- i. tertib kesehatan;
- j. tertib bulan Ramadhan; dan
- k. tertib suara.

#### Bagian Pertama Tertib Jalan

##### Pasal 5

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki harus menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang disediakan.
- (3) Dalam hal belum tersedia trotoar dan rambu atau tempat penyeberangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pejalan kaki berhak berjalan dan menyeberang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

##### Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang:

- a. menutup jalan;
- b. membuat atau memasang portal di jalan;
- c. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar jalur pemisah jalan;
- h. membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan;
- i. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak badan jalan atau membahayakan keselamatan lalu lintas;
- j. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- k. merusak pagar pengaman dan opret jembatan;
- l. membongkar dan meletakkan muatan material bangunan di jalan dan jembatan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas; dan

#### Bagian Kedua Tertib Jalur Hijau, Taman Kota dan Tempat Umum

##### Pasal 7

Setiap orang dilarang, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang untuk :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau atau taman kota;
- c. melompat atau menerobos pagar yang ada di sepanjang jalur hijau dan taman kota;
- d. memanjat, menebang, memotong, mengambil pohon dan/atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau dan taman kota;
- e. memasang, menempel atau menggantungkan benda-benda / barang-barang di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum;

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor / tidak bermotor di jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- g. menaik, menurunkan dan membongkar barang-barang muatan kendaraan disepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya;
- h. meletakkan/menimbun barang bangunan atau benda-benda lain disepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- i. membuang sampah, buang air besar dan/atau buang air kecil disepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum; dan
- j. melakukan aktivitas usaha permainan tanpa izin.

#### Bagian Ketiga Tertib Sungai, Parit, Saluran Air/Drainase

##### Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang untuk :

- a. mendirikan bangunan diatas turap dan tanggul yang tidak sesuai dengan peruntukannya kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- b. menambat sampan/kapal/perahu dan alat transportasi air lainnya di jembatan;
- c. melakukan perbuatan/aktivitas yang dapat menyebabkan tercemarnya air sungai, parit dan danau;
- d. memindahkan saluran air / drainase, menyumbat, menutup secara permanen saluran air / drainase, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya saluran air / drainase kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang; dan
- e. menangkap ikan atau sejenisnya di sungai, parit, saluran air / drainase dengan mempergunakan aliran listrik, atau bahan beracun atau bahan lain yang mengakibatkan kerusakan akan habitat ikan atau sejenisnya.

#### Bagian Keempat Tertib Lingkungan

##### Paragraf 1 Tertib Membuang Sampah

##### Pasal 9

- (1) Setiap orang harus membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, parit, saluran / drainase, danau dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

##### Paragraf 2 Tertib Keindahan

##### Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang memasang sepanduk, merusak, mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan yang bersifat komersial yang bukan pada tempatnya.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ;

UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. sarana umum yang dapat berupa dinding atau tembok, pagar, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik/tanpa listrik, dan pohon;
- b. balaho/papan reklame/pamphlet yang dipasang atas izin pihak berwenang; dan
- c. bangunan milik perorangan atau badan tanpa izin pemilikan Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 3 Tertib Pemeliharaan Hewan

#### Pasal 11

Setiap orang dilarang melepas dan membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran dijalan dan ditempat umum sehingga merusak dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

#### Bagian Kelima Tertib Usaha / Berjualan

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
  - a. menyediakan dan/atau mengoperasikan alat ketangkasan dan elektronik yang mengarah pada perjudian, pornografi dan pornoaksi.
  - b. memfasilitasi dan/atau melaksanakan kegiatan hiburan yang mengarah pada perjudian, pornografi dan pornoaksi.
  - c. menjual dan/atau menyediakan atau mengedarkan barang atau peralatan yang mengarah pada perjudian, pornografi dan pornoaksi.
- (2) Alat ketangkasan dan elektronika sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi;
  - a. dindong;
  - b. video game;
  - c. warnet;
  - d. playstation; dan
  - e. permainan sejenisnya.
- (3) Kegiatan hiburan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
  - a. Hiburan malam;
  - b. diskotik
  - c. karaoke dalam ruangan ataupun luar ruangan; dan
  - d. kegiatan sejenis lainnya.

#### Pasal 13

- (1) setiap orang atau badan yang diberikan izin menyediakan atau mengoperasikan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. batas waktu permainan adalah dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB dan wajib ditutup sementara dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 19.30 WIB untuk mendukung dan menghormati pelaksanaan maghrib mengaji.
  - b. melarang anak-anak usia sekolah mengunjungi/bermain pada jam sekolah; dan
  - c. tidak dibenarkan menerima pengunjung yang memakai atribut sekolah.
  - d. tidak mempekerjakan anak dibawah umur.

UIN SUSKA RIAU





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) setiap orang atau badan yang diberikan izin memfasilitasi dan/atau melaksanakan kegiatan hiburan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. batas waktu permainan adalah dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB ;
  - b. melakukan pembatasan usia pengunjung;
  - c. tidak mempekerjakan anak dibawah umur.

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang berjualan di jalan, jembatan, trotoar, turap, jalur hijau, taman kota, dan tempat umum lainnya.
- (2) Bupati dapat menetapkan bagian jalan dan tempat umum lainnya sebagai tempat usaha dan/atau pedagang kaki lima pada satu kegiatan yang telah direncanakan.
- (3) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud ayat (2) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keamanan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barang dagangannya akan di lakukan penertiban.
- (5) Bagian jalan dan tempat kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keenam Tertib Bangunan

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang:
  - a. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan;
  - b. mendirikan bangunan di atas tanah milik Pemerintah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik Pemerintah; dan
  - c. membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dilarang melaksanakan aktifitas pembangunan sebelum memiliki izin sesuai peruntukannya.
- (3) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

#### Bagian Ketujuh Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

#### Pasal 16

- (1) Setiap pemilik, Penghuni diwajibkan memelihara dan menata pohon atau tumbuhan yang mengganggu atau menimbulkan bahaya.
- (2) Setiap pemilik, Penghuni dapat memberi penerangan jalan di depan bangunannya atas biaya sendiri.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pemilik rumah kontrakan atau rumah pemondokan wajib melaporkan setiap penghuni kontrakan atau rumah pemondokan kepada Ketua RT setempat.

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Setiap orang yang bertamu di rumah warga lebih dari 1 x 24 jam wajib melapor kepada RT setempat.

#### Bagian Kedelapan Tertib Sosial

##### Paragraf 1 Tertib Meminta Sumbangan/Mengemis dan Mengamen

##### Pasal 18

Setiap orang dilarang :

- a. meminta sumbangan yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor, sekolah, rumah sakit dan tempat umum lainnya tanpa izin pejabat berwenang;
- b. menyuruh, memfasilitasi atau membantu orang lain untuk meminta sumbangan, mengemis dan/atau mengamen; dan
- c. memberikan sejumlah uang atau barang kepada peminta sumbangan, pengemis dan/atau pengamen.

##### Pasal 19

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) yang tidur dan membuat tempat untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan meminta-minta.
- c. setiap orang atau perkumpulan yang menghimpun anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; dan
- d. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mengamen, meminta minta dan atau sejenisnya di jalan dan tempat umum lainnya.

##### Paragraf 2 Tertib Sosial Lainnya

##### Pasal 20

Penyelenggaraan kegiatan hiburan malam tidak diperkenankan menggunakan pakaian/busana yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi.

##### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan pemerintah daerah dapat menutup dan atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

#### Bagian Kesembilan Tertib Kesehatan

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Pasal 22

- Setiap orang dilarang, kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang:
- a. menyelenggarakan praktek pelayanan kesehatan, pengobatan atau pelayanan kesehatan jasmani; dan
  - b. menawarkan atau menjual barang atau jasa yang mempunyai efek terhadap kesehatan.

#### Bagian Kesepuluh Tertib Bulan Ramadhan

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang makan dan minum pada jam berpuasa pada tempat umum atau terbuka.
- (2) Setiap orang dilarang memperjualbelikan, membunyikan, atau meledakan alat yang dapat menimbulkan suara ledakan dengan sengaja pada siang hari ataupun malam hari yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah.

#### Bagian Kesebelas Tertib Suara

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan pengeras suara pada waktu tertentu.
- (2) Waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jam 00:01 WIB sampai dengan 05:30 WIB.
- (3) Penggunaan pengeras suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pengeras suara yang digunakan untuk kepentingan dan keperluan ibadah atau darurat.

#### BAB V PENYAKIT MASYARAKAT

#### Pasal 25

- Penyakit Masyarakat meliputi :
- a. kegiatan Prostitusi;
  - b. kegiatan lesbian, homoseks dan biseksual;
  - c. penyalahgunaan lem dan obat-obatan;
  - d. penyalahgunaan minuman atau zat-zat lain yang dapat menyebabkan ketergantungan atau yang memabukkan; dan
  - e. kegiatan asusila lainnya.

#### Pasal 26

- (1) penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf a dan huruf b adalah :
  - a. melakukan hubungan seks dalam bentuk prostitusi, lesbian, homoseks dan biseksual;
  - b. memfasilitasi terjadinya hubungan seks dalam bentuk prostitusi, lesbian, homoseks dan biseksual;
  - c. melindungi perbuatan, tindakan dan perilaku yang menimbulkan hubungan seks dalam bentuk prostitusi, lesbian, homoseks, biseksual dan/atau Penyimpangan Seksual lainnya; dan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. melakukan kegiatan atau perbuatan sebagai Penjaja Seks Komersial, Lelaki hidung belang, Waria atau melakukan transaksi, negosiasi maupun perantara kearah terjadinya perbuatan maksiat atau memberi kesempatan tempat maupun tempat usaha, peluang untuk terjadinya perbuatan maksiat tersebut.
- (2) Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf c adalah:
  - a. menyalahgunakan lem dan obat-obatan tidak pada peruntukannya sehingga membahayakan pengguna atau lingkungannya;
  - b. menjual dan memfasilitasi penyalagunaan lem dan obat-obatan yang patut diduga untuk disalah gunakan kepada anak dibawah umur.
- (3) Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf d adalah:
  - a. minum-minuman oplosan dan menyalahgunakan zat-zat lain yang menyebabkan ketergantungan dan memabukkan sehingga menimbulkan gangguan;
  - b. menyimpan atau membawa atau menjual minuman oplosan dan zat-zat lain yang menyebabkan ketergantungan dan memabukkan sehingga menimbulkan gangguan.
- (4) Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf e adalah: Setiap orang baik sendiri, berpasangan ataupun berkelompok berada pada tempat dan/atau waktu tertentu yang tidak patut menurut norma agama atau adat serta perilaku.

#### Pasal 27

- (1) Setiap pemilik dan/ atau pengusaha hotel, wisma, penginapan dan/ atau pemondokan dilarang menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan dalam satu kamar.
- (2) Setiap pemilik dan/ atau pengusaha hotel, wisma, penginapan dan/ atau pemondokan wajib membantu mencegah dan mendukung penegakan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengusaha Hotel, Wisma, Penginapan, Pemondokan, Tempat Hiburan, Objek Wisata, Salon Kecantikan dan Cafe dilarang :
  - a. mempergunakan fasilitas di atas untuk sesuatu yang bukan peruntukannya sehingga memungkinkan terjadinya Penyakit Masyarakat;
  - b. memberi dan memperlancar kesempatan terjadinya Penyakit Masyarakat;
  - c. memperdagangkan benda-benda yang merangsang terjadinya Penyakit Masyarakat; dan/atau
  - d. meminjamkan fasilitas yang merangsang terjadinya Penyakit Masyarakat.
- (4) Setiap orang dilarang menjadi perantara ataupun pemberi dukungan yang memberi peluang untuk terjadinya Penyakit Masyarakat.

#### BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 28

Setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang aman, tertib dan tentram serta terbebas dari perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat.

UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Pasal 29

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berhak melakukan pemaksaan terhadap penanggung jawab usaha untuk mencegah dan mengakhiri perbuatan dan tindakan Penyakit Masyarakat
- (2) Masyarakat yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Instansi terkait.

#### Pasal 30

Setiap orang wajib:

- a. mencegah segala perbuatan tindakan atau perilaku penyakit masyarakat yang diketahui atau yang patut diketahui akan mengganggu ketertiban umum;
- b. mengawasi supaya tidak terjadi tindakan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya;
- c. mengawasi karyawan/karyawati yang berada di bawah wewenangnya supaya tidak menjadi korban Penyakit Masyarakat dan mengganggu Ketertiban Umum; dan
- d. melaporkan dan/atau mengadukan kepada pihak yang berwajib apabila menemukan tindakan dan/atau perbuatan Penyakit Masyarakat atau tindakan yang dapat menjurus kepada terjadinya Penyakit Masyarakat dan mengganggu Ketertiban Umum.

#### Pasal 31

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang:
  - a. mengeluarkan izin usaha dan/ atau kegiatan yang berpotensi berkembangnya perbuatan, tindakan dan perilaku Penyakit Masyarakat.
  - b. memperpanjang izin usaha dan/ atau kegiatan yang diduga dan/atau patut diduga berpotensi bagi tumbuh dan berkembangnya Penyakit Masyarakat.
- (2) Pejabat yang Berwenang mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan yang diduga dan/atau patut diduga berpotensi tumbuh dan berkembangnya perbuatan, tindakan dan perilaku Penyakit Masyarakat.

### BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 32

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan mencegah penyakit masyarakat dalam makna yang seluas-luasnya.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan penyakit masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti dan memberikan jaminan keamanan serta perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Bupati melalui organisasi perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bersama organisasi perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama – sama unsur terkait lainnya.
- (3) Penindakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan unsur terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan – keterangan mengenai pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pejabat PPNS berdasarkan kuasa khusus penuntut umum dapat langsung menyidangkan pelanggaran peraturan daerah ini ke pengadilan negeri.

### BAB XI SANKSI

#### Bagian Pertama Sanksi Administratif

##### Pasal 35

- (1) Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 30, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - h. denda administratif.

#### Bagian Kedua Sanksi Pidana

##### Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 huruf c dan huruf e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 dan Pasal 27, Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan maka dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

##### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administratif dan sanksi pidana diatur dengan Peraturan Bupati.

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 38**

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 tahun 2008 tentang ketertiban umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Tahun 2008) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 6 Oktober 2016  
BUPATI INDRAGIRI HILIR,  
  
H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 6 Oktober 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

  
H. SAID SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2016 NOMOR //

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI  
RIAU (11.74.C/2016)

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **"PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENGAWASAN PENGGUNAAN PARIT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 DI PARIT SATU KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG"** yang ditulis oleh :

Nama : VISSA AFRILITA  
NIM : 11527202957  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunafasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020  
Waktu : Jam, 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQSAH**

Ketua  
Dr. Drs. Ilajar, M.Ag

Sekretaris  
Hen rizal Hadi Wahab, LC. MA

Penguji I  
Dr. Muhammad Darwis, S.HI. MH

Penguji II  
Nur'aini Sahu, SH. MH

Mengetahui,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus S.Ag  
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**


Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. N A M A                         | : Vissa Afrilita  |
| 2. NOMOR MAHASISWA                 | : 11527202957   |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN           | : Pengawasan terhadap penggunaan parit berdasarkan peraturan daerah kabupaten indragiri hilir no 11 tahun 2016 di parit satu kota baru kecamatan kentan |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan          | : Selasa / 31 Desember 2019   |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah | :   |
| a. Judul                           | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan   |
| b. Latar Belakang Masalah          | : Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan   |
| c. Permasalahan                    | : Jelas / MasihKabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas  |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan  |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada)    | : Jelas / KurangJelas / Perlu Disempurnakan   |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada)    | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam  |
| g. Metode Penelitian               | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan / <i>kurang Tabel</i>   |
| h. Daftar Pustaka                  | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti   |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

  
Muslim, S.Ag, SH, M.Hum

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar  
Dikonsultasikan dengan WD I

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, e-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN PARIT  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR  
11 TAHUN 2016 DI PARIT SATU KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG,  
ditulis oleh saudara :

Nama	: VISSA AFRILITA
NIM	: 11527202957
Program Studi	: Ilmu Hukum
Diseminarkan pada	
Hari / Tanggal	: Selasa / 30 Desember 2019
Narasumber	: MUSLIM, S.Ag, S.H, M.Hum

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2020

Kepala Sub. Bagian Akademik  
Kemahasiswaan dan Alumni

JALINUS S. Ag  
NIP. 19750801 200701 1 023

Narasumber

MUSLIM, S.Ag, S.H, M.HUM  
NIP. 19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/4950/2020  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 28 Juli 2020

Kepada  
Yth. Muslim, S.Ag. SH., M.Hum  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum warhamatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : VISSA AFRILITA  
NIM : 11527202957  
Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN PARIT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 DI PARIT SATU KOTABARI SEBERIDA KECAMATAN KERITANG"

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**MUSLIM S.Ag.,SH.M.Hum**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juli 2020

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

*Assalamu 'alaikum. Wr. Wb*


Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta memperbaiki seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari VISSA AFRILITA, yang berjudul **"Pengawasan Terhadap Penggunaan Parit Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Di Parit Satu Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang"** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.*

Pembimbing

  
**MUSLIM S.Ag.,SH.M.Hum**  
 NIP. 19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10118/2019  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 26 Desember 2019

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : VISSA AFRILITA  
NIM : 11527202957  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : PARIT SATU KOTABARU KECAMATAN KERITANG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN PARIT BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 DI PARIT SATU  
KOTABARU KECAMATAN KERITANG

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U

Email : dpmptsp@riau.go.id

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-Riset/30108

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET

DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca

Surat Permohonan Riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor

Un.04/F.IPP.00.9/1011/2019 Tanggal 26 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : VISSA AFRILITA
2. NIM / KTP : 11527202957
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN PARTI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 DI PARTI SATU KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG
7. Lokasi Penelitian : DESA KOTABARU SEBERIDA, KECAMATAN KERITANG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Pekanbaru

Pada Tanggal 24 Januari 2020



Disampaikan Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan  
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN  
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**  
Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2020/33

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/30108 Tanggal 24 Januari 2020, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **VISSA AFRILITA**  
NIM : 11527202957  
Program studi/Jenjang : Ilmu Hukum/S1  
Alamat : Jl. Penunjang Pulau Kijang  
Judul Penelitian : **PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN PARIT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 DI PARIT SATU KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG**  
Lokasi Penelitian : **DESA KOTA BARU SEBERIDA, KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 3 Februari s/d 3 Mei 2020.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 3 Februari 2020

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
Kasubbid Ormas dan LSM,

  
**DEDDY KURNIAWAN, S.Sos**  
Penata TK. I  
NIP. 19730727 199303 1 002

**Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;**  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
KECAMATAN KERITANG  
DESA KOTABARU SEBERIDA**

Jalan Jend. Ahmad Yani Kotabaru Seberida

Kode Pos 29274

**REKOMENDASI PENELITIAN  
DAN PENGUMPULAN DATA ( SURVEY )**

Nomor : 39 / Rek / Kbs / VI/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No. 070/BKBP-POLMAS/2020/33 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	: VISSA AFRILITA
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tgl Lahir	: Kotabaru, 04-04-1997
NIM	: 11527202957
Program Studi	: Ilmu Hukum
Lokasi	: Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang
Judul KTI	: " Pengawasan terhadap penggunaan Parit berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 11 Tahun 2016 di Parit No 01 Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir "

Bahwa sesuai dengan surat tersebut yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Penelitian " Pengawasan terhadap penggunaan Parit berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 11 Tahun 2016 di Parit No 01 Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir " sejak tanggal 07 Februari 2020 s/d tanggal 10 Pebruari 2020

Adapun yang bersangkutan selama melaksanakan dan melakukan penelitian tersebut telah dapat mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan masyarakat Desa Kotabaru Seberida dan di Nilai Baik.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotabaru Seberida, 03 Juni 2020

KEPALA DESA KOTABARU SEBERIDA,





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB**

Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Telp./Fax. (0762) 20043

Email:pn\_bkn@yahoo.com Website: www.pn-bangkinang.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: W4.U7/ 475 /UM.01.10/TV/2018

Yang bertandatangan dibawah ini Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : VISSA AFRILITA  
 Tempat / Tgl. Lahir : Kota Baru / 04 april 1997  
 NIM : 11527202957  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Syariah dan Hukum – UIN Suska Riau  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Jl. H. Pamek - Pulau Kijang

Telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB pada tanggal 1 Pebruari 2018 s.d 31 Maret 2018 dengan baik

Demikian dibuat surat keterangan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bangkinang, 6 April 2018

An. KETUA PENGADILAN NEGERI  
 BANGKINANG KELAS IB  
 SEKRETARIS

  
 RICKO OKTAVIUS ST  
 NIP. 19760824 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU



## RIWAYAT PENULIS

Vissa Afrilita, lahir di Kotabaru pada tanggal 4 April 1997.

Buah kasih dari pasangan bapak Jusmadi, S.Pdi.M.Pd dan ibu

Saidah. Pendidikan formal dari SDN 005 Kotabaru Seberida

Kecamatan Keritang dan lulus pada tahun 2009, selanjutnya

penulis meneruskan pendidikan di MTS Nurul Huda Kotabaru Seberida

Kecamatan Keritang dan lulus pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan

pendidikan di SMAN 1 Reteh Pulau Kijang Kecamatan Reteh dan lulus pada

tahun 2015. Setelah lulus dari SMA, berkat rezeki dari Allah SWT dan kasih

sayang orang tua, penulis dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Jurusan Ilmu Hukum konsentrasi

Hukum Tata Negara pada tahun yang sama. Pada tahun 2018 penulis

melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) DI Pengadilan Negeri

Bangkinang Kelas 1B. Tahun 2020 penulis dinyatakan menyelesaikan pendidikan

(Lulus) dengan judul penelitian skripsi **“PERAN SATUAN POLISI PAMONG**

**PRAJA TERHADAP PENGAWASAN PENGGUNAAN PARIT**

**BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI**

**HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 DI PARIT SATU KOTABARU**

**SEBERIDA KECAMATAN KERITANG”**.

**Motto :** Be Patien And Believe In Your Abilities, Glorify The Blessing Of

Parents, Intend For Good and Always Pray To Allah SWT.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.